

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon periode 2010-2025 dengan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 24 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon periode 2010-2025. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika PAD meningkat, maka kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan juga meningkat.
2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon periode 2010-2025 dapat diartikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang diterima daerah tidak secara otomatis mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
3. Realisasi Belanja Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon periode 2010-2025 membuktikan bahwa bahwa peran pemerintah daerah melalui kebijakan pengeluaran memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Belanja daerah yang dialokasikan secara tepat sasaran mampu menciptakan berbagai dampak positif, seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat.

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Realisasi Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu sumber pendapatan atau satu jenis kebijakan fiskal saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara berbagai komponen keuangan daerah. PAD sebagai sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan sebagai dana transfer dari pemerintah pusat, serta belanja daerah sebagai instrumen pengeluaran pemerintah, memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendorong aktivitas ekonomi.

B. Implikasi

Berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan dalam kesimpulan di atas, berikut implikasi penelitian yang mencakup implikasi teoritis dan implikasi kebijakan secara terperinci.

1. Implikasi atas pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Terjawabnya rumusan masalah pertama dengan temuan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi kerangka Teori Keynesian sebagai *grand theory* bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan lokal merupakan fondasi bagi kemampuan pemerintah dalam melakukan stimulus fiskal yang mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Secara praktis, implikasi yang timbul adalah pemerintah Kabupaten Cirebon perlu segera mengakselerasi upaya peningkatan PAD melalui beberapa langkah strategis. Pertama, intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem pembayaran pajak *online* dan integrasi data wajib pajak secara elektronik, agar potensi pajak yang selama ini belum tergali dapat direalisasikan secara optimal. Kedua, ekstensifikasi objek retribusi daerah dengan melakukan pemetaan ulang seluruh potensi retribusi di sektor jasa dan perizinan, khususnya yang berkaitan dengan tumbuhnya kawasan industri dan perdagangan di Kabupaten Cirebon. Ketiga, penguatan kinerja BUMD melalui tata kelola

yang lebih profesional dan berorientasi pada profitabilitas, sehingga kontribusi BUMD terhadap PAD dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan PAD yang berkelanjutan pada akhirnya akan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Cirebon dan memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

2. Implikasi atas pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Terjawabnya rumusan masalah kedua dengan temuan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan perspektif Teori Harrod-Domar bahwa sumber pembiayaan yang tidak dikonversi menjadi investasi produktif tidak akan menghasilkan akumulasi modal yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan. Secara praktis, temuan ini mengandung implikasi kebijakan yang krusial berupa besarnya Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Cirebon selama ini belum diimbangi dengan kualitas penggunaan yang berorientasi pada pertumbuhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan restrukturisasi anggaran secara fundamental, yakni dengan secara bertahap menggeser dominasi belanja pegawai menuju belanja modal yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pasar daerah, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu membangun *roadmap* pengurangan ketergantungan fiskal secara terencana, agar dalam jangka menengah dan panjang daerah dapat semakin mandiri dalam membiayai pembangunannya melalui kekuatan PAD yang terus ditingkatkan.
3. Implikasi atas pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Terjawabnya rumusan masalah ketiga dengan temuan bahwa Realisasi Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, temuan ini merupakan konfirmasi terkuat atas relevansi Teori Keynesian sebagai

grand theory dalam penelitian ini; konsep fiskal multiplier Keynes terbukti bekerja secara nyata di Kabupaten Cirebon, di mana setiap peningkatan belanja pemerintah daerah menghasilkan efek pengganda yang merangsang aktivitas ekonomi secara lebih luas. Secara praktis, implikasi yang timbul adalah bahwa peningkatan belanja daerah harus selalu disertai dengan perbaikan kualitas alokasi agar efek pengganda tersebut dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memprioritaskan alokasi belanja pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal, seperti pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah yang mendukung distribusi barang dan jasa, belanja pendidikan yang mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri lokal, belanja kesehatan yang meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, serta belanja yang mendorong pengembangan sektor unggulan Kabupaten Cirebon seperti industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Lebih jauh, temuan ini mengandung implikasi perlunya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang ketat, agar setiap rupiah belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan dampaknya secara terukur terhadap indikator pertumbuhan ekonomi, khususnya peningkatan PDRB Kabupaten Cirebon.

4. Implikasi atas rumusan masalah keempat mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Realisasi Belanja Daerah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Terjawabnya rumusan masalah keempat dengan temuan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi sebesar 83,8 persen. Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi bahwa sistem keuangan daerah bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh; sejalan dengan kerangka Teori Keynesian, komponen penerimaan (PAD dan Dana Perimbangan) dan komponen pengeluaran (Belanja Daerah) saling berinteraksi dalam membentuk kebijakan fiskal daerah yang secara kolektif menentukan dinamika pertumbuhan ekonomi. Ini sekaligus

memperkuat Teori Harrod-Domar bahwa pertumbuhan jangka panjang memerlukan konsistensi antara mobilisasi sumber pembiayaan dan konversinya menjadi investasi produktif. Secara praktis, temuan ini mengandung implikasi bahwa kebijakan fiskal daerah tidak boleh dikelola secara parsial; pemerintah Kabupaten Cirebon perlu membangun satu kerangka kebijakan fiskal yang terintegrasi, di mana peningkatan PAD, optimalisasi penggunaan Dana Perimbangan, dan penajaman kualitas belanja daerah dirancang dan diimplementasikan secara sinergis dalam satu arah pembangunan yang sama. Dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD perlu secara eksplisit merumuskan target-target fiskal yang mencakup pertumbuhan PAD, efisiensi Dana Perimbangan, dan kualitas belanja daerah sebagai satu paket indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon, sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kritis terhadap penggunaan Dana Perimbangan, karena besarnya dana yang diterima tidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidakefisienan dalam alokasi anggaran, terutama karena masih dominannya belanja rutin dibandingkan belanja produktif.
2. Realisasi Belanja Daerah yang terbukti berpengaruh signifikan harus dijadikan fokus utama kebijakan fiskal, namun dengan catatan bahwa peningkatan belanja harus disertai dengan perbaikan kualitas alokasi. Tanpa perbaikan tersebut, peningkatan belanja hanya akan meningkatkan pengeluaran tanpa memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi anggaran secara ketat, karena tidak signifikannya beberapa variabel fiskal mengindikasikan

bahwa permasalahan bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi pada efektivitas penggunaannya.

4. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji lebih dalam faktor non-fiskal seperti investasi, struktur ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia, karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan anggaran, tetapi juga oleh kekuatan sektor riil.

